

KEBERAGAMAN DALAM BERAGAMA PADA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA

Mudzakir
Universitas Pamulang
Irul0706@yahoo.co.id

Abstrak. Kehadiran berbagai agama di Indonesia merefleksikan agar umat beragama tidak saling menganiaya orang lain. Akan tetapi, agama yang mengajarkan perdamaian tidak jarang dijadikan legitimasi untuk mengganggu, memusuhi, dan memusnahkan umat lain. Di Indonesia, konflik antar umat beragama telah menjadi rahasia umum, dalam kondisi seperti ini ajaran agama dapat dijadikan sebagai alat pembenar bagi pemeluknya untuk melakukan tindakan permusuhan dan pembunuhan terhadap pemeluk agama lain. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan esensi ajaran agama itu sendiri yang selalu mengajarkan cinta kasih dan perdamaian. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan pemeluk agama yang beragam. Belum lagi perbedaan suku dan ras, bisa jadi faktor ini juga berpotensi memperkeruh suasana konflik agama. Namun demikian, kemungkinan di atas bisa jadi tidak terbukti apabila masyarakat dan bangsa Indonesia mampu menumbuhkan sikap empati terhadap perbedaan tersebut.

Kata Kunci: *Bangsa dan Negara, Beragama*

MUQODIMAH

Kekerasan atas nama agama sering mewarnai kehidupan manusia. Entah ia muncul sebagai akibat hubungan antarumat beragama yang tidak dibarengi sikap toleran, atau ia sengaja diciptakan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. Jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya konflik antar agama lebih banyak disebabkan faktor ekonomi dan faktor politik, di samping juga adanya usaha sengaja dari kelompok yang ingin mempertahankan atau meraih status sosial yang lebih baik. Dan apabila konflik agama tidak diberikan perhatian serius dari semua pihak, maka bangsa Indonesia akan menghadapi persoalan besar, yakni disintegrasi bangsa dan carut marutnya NKRI.

Potensi konflik di Indonesia sangat tinggi, hal ini disebabkan karena sifat heterogenitas di berbagai sendi kehidupan. Kondisi semacam ini sangat disadari oleh semua pihak terutama para cendekiawan. Karena itu sebagai wujud sikap kekhawatiran dan kepedulian sehingga diupayakan adanya penyadaran sehingga konflik-konflik yang bersifat SARA tidak berkelanjutan. Try Sutrisno dalam “Dimensi Pertahanan Keamanan dari Integrasi Nasional”. Tulisan ini menyoroti sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila seharusnya juga nilainya Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, dan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan dalam mengatasi setiap masalah bangsa (Sutrisno T.,

1996). Empat konsensus dasar merupakan struktur dan modalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Kebhinekaan). Tentu semua ini tidak bisa lepas dari sentuhan aktor/agen yang membuat struktur dan sekaligus mematuhi struktur sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Tulisan Masykuri Abdila dalam “Toleransi Beragama dalam Masyarakat Demokrasi dan Multikultural”. Tulisan ini menekankan pada perlunya nilai-nilai toleransi yang menjadi kesepakatan semua pihak. Nilai-nilai toleransi tersebut adalah (1) toleransi antarpenganut suatu agama tertentu, (2) toleransi antarpenganut agama yang berbeda, dan (3) toleransi antarpenganut agama dengan pemerintah (Abdila, 2003).

Dalam ”Prinsip-Prinsip Universal Toleransi Antar Umat Agama”, mengatakan bahwa prinsip-prinsip toleransi agama ini, yang merupakan bagian dari visi teologi atau akidah, telah dimiliki oleh setiap agama, maka sudah selayaknya jika setiap umat bergama turut serta aktif untuk memperjuangkan visi-visi toleransinya di khalayak masyarakat plural. Perbedaan umat manusia, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa serta agama dan sebagainya, merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Tuhan yang Maha Kuasa (Anonim, 2009).

PEMBAHASAN

Kerukunan Umat Beragama

Konsep awal yang harus difahami adalah tidak ada satupun agama di Indonesia yang kita kenal sampai sekarang berasal dari Indonesia. Semua agama, apakah agama Hindu, Buddha, Islam, Nasrani dan Konghuchu adalah berasal dari luar Indonesia, mungkin tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan semua agama di Indonesia adalah “agama import” (Subagya, 1981:5). Namun demikian, semua itu diterima dan berkembang karena dapat menyesuaikan diri dengan unsur-unsur lokal melalui proses akulturasi. Kedatangan berbagai agama di tanah air, bukan masuk dalam wilayah yang tidak mengenal sistem religi, melainkan sudah mengenalnya walaupun awalnya masih sederhana. Seperti kedatangan agama Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, yang dikenal juga dengan nama agama tradisional.

Hal ini dibuktikan dengan sudah dikenalnya nama sang pencipta di setiap daerah dengan nama yang berbeda-beda (Subagya, 1981: 66-68). Begitu juga dengan kedatangan agama Islam yang diperkirakan sejak abad VII pada masa kerajaan Sriwijaya. Kedatangan

para pedagang Islam tersebut dalam wilayah yang penduduknya sudah mengenal agama Buddha. Sejak awal abad XVI yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Demak merupakan puncak perkembangan agama Islam di tanah air. Peranan wali/sunan sangat penting dengan menggunakan media budaya setempat, seperti melalui wayang, gending-gending Jawa dsb, bahkan semua itu dilestarikan (Lombard, 2005:340-341). Jadi sekilas latar belakang sejarah tersebut menunjukkan, bahwa perkembangan agama apapun di Indonesia tidak diawali dengan konflik, tetapi melalui cara-cara damai dan beradab. Menurut penulis, melihat latar belakang sejarah kedatangan agama-agama di Indonesia dilandasi oleh sifat empati. Kata “empati”, itulah kata yang tepat, kalau melihat hubungan antar agama dan kepercayaan lokal. Karena kata ini mempunyai makna bukan sekedar mengakui adanya perbedaan agama dan kepercayaan, tetapi mau “menerima” perbedaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian dapat dikatakan “empati” merupakan modalitas yang sudah dimiliki oleh bangsa melalui proses “historisasi”. Modalitas yang empati tentu tidak akan muncul tiba-tiba, namun peranan aktor/agen sangat penting. Kalau di kehidupan kemudian terjadi konflik-konflik yang bersifat SARA, berarti terjadi “rigres” dalam kehidupan berbhineka. Sering kita mendengar “pengalaman adalah guru utama”. Sejarah adalah pengalaman suatu bangsa, seharusnya diposisikan sebagai guru dalam berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Berbicara struktur, modalitas, dan pentingnya peranan aktor/agen akan mengingatkan pandangan Anthony Giddens dengan “teori strukturasi”. Menurut Martono, khusus posisi Giddens ada pada filsafat post-positivisme yang bersifat interpretatif (Martono, 2014: 72-73). Karena itu Giddens dengan teori strukturasinya mengatakan “teori strukturasi” didasarkan pada premis bahwa “dualisme” harus dikonseptualisasikan sebagai sebuah “dualitas”, struktur adalah sarana, tetapi juga hasil atau produk individu (Giddens, 2010:xix). Teori Giddens, fokus kajiannya adalah tindakan sosial (social action), dan pengalaman hidup (life experience). Karena itu teori strukturasi Giddens termasuk dalam Teori Sosial Kritis yang menggambarkan hubungan antara struktur dan manusia, individu sebagai aktor (Agger, 2014:9). Seorang penganut filsafat post-positivism atau postmodernis harus berani melakukan “dekonstruksi” terhadap berbagai fenomena yang terjadi, begitu juga dengan berbagai isu-isu SARA yang sering muncul di media sosial yang terkadang hoax. Para postmodernis umumnya tidak suka dengan penyeragaman dan tidak suka pula pada pembatasan, tetapi akan lebih senang dengan dan menerima perbedaan, keberagaman (Lubis, 2014:15).

Kehidupan dalam masyarakat akan damai, teratur (order), atau konflik, tidak teratur (disorder) sangat tergantung pada aktor/agen sebagai produsen struktur (pola, aturan) dalam masyarakat. Berdasarkan pandangan Weber terdapat tiga tipologi kepemimpinan yang berkembang dalam masyarakat, yaitu 1) otoritas tradisional (traditional authority), 2) otoritas kharismatik (charismatic authority), dan 3) otoritas legal/rasional (legal/rational authority) (Arisandi, 2015: 68-70). “Guru”, sangat memenuhi ketiga tipe kepemimpinan tersebut di atas. Karena itu peranan guru sangat penting, baik buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara sangat tergantung pada guru (selain Guru Swadhyaya).

Abdul Rahman dan Khambali menulis, bahwa setiap penganut agama biasanya cenderung eksklusivitas dengan mengklaim bahwa agama mereka adalah satu-satunya agama yang benar (Rahman & Kambali, 2013). Namun di lain pihak masih terdapat kelompok-kelompok keagamaan yang menentang sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Perbedaan ideologi keagamaan inilah kemudian bisa menyebabkan munculnya konflik (Jellen, 2007:39). Begitu juga masalah mayoritas dan minoritas. Menurut Haerudin, bahwa pluralisme adalah paham, sikap terbaik untuk mengelola dan menyongsong anugerah keberagaman (pluralitas). Sebuah sikap yang berasal dari pandangan, bahwa manusia beragama dialah manusia yang mencintai Tuhan, sementara mustahil mencintai Tuhan tanpa mencintai ciptaanNya (Nurcholis & M. Dja'far, 2014: xi).

Dalam komunitas minoritas konflik muncul dari upaya mengejar kepentingan yang berbeda, tujuan dan aspirasi oleh individu, dan atau kelompok. Walaupun sangat disadari, bahwa konflik bersifat alami, dan sebagai eksistensi kehidupan sosial, sehingga intoleransi, konflik dan perang adalah fenomena sosial yang tak terelakkan. Namun yang terpenting adalah bagaimana mencari solusi untuk mengakhiri konflik (Echikwome, 2013:83). Kesadaran dan niat, etiked untuk bersatu merupakan kunci untuk hidup berdampingan sehingga memunculkan rasa kebangsaan yang sejati (Soekarno, 1965: 3-4). Ini artinya hendaknya mulai dari dalam diri sendiri (faktor internal), disamping adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengkondisikan (faktor eksternal) sehingga dapat memunculkan kesadaran untuk hidup bersama dalam keberagaman. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah, semua itu sebuah pilihan dengan segala konsekuensinya. Dengan segala dinamika dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat, menurut Pruitt dan Rubin (Pruitt & Rubin, 2011: 56-59), terdapat lima strategi dasar dalam menyelesaikan konflik yaitu:

1. *Contending* (bertanding, bersaing), segala usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memperdulikan pihak lain. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini tetap mempertahankan aspirasinya sendiri dan mencoba membujuk pihak lain untuk mengalah, termasuk diantaranya dengan mengeluarkan ancaman.
2. *Problem Solving* (pemecahan masalah), usaha mengidentifikasi masalah yang memisahkan kedua belah pihak dan mengembangkan serta mengarah pada sebuah solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Cara ini dapat dilakukan dengan cara kompromi dan integratif. Kompromi adalah alternatif nyata yang berada di antara posisi yang lebih disukai oleh masing-masing pihak. Sedangkan integratif adalah rekonsiliasi kreatif atas kepentingan-kepentingan berdasar masing-masing pihak.
3. *Yielding*, (mengalah), dimana orang harus menurunkan aspirasinya sendiri, tidak berarti penyerah total, karena mengalah bukan berarti kalah.
4. *Inaction* (diam), adalah tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya menyelesaikan kontroversi.
5. *Withdrawing* (menarik diri), adalah sebagai upaya untuk menghindari pertengkaran dengan cara menghindarkan diri dari masalah yang dihadapi. Di Indonesia kesadaran untuk hidup rukun antar warga negara yang berbeda, termasuk perbedaan agama hendaknya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Faktor internal, hendaknya dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan, seharusnya dibarengi juga dengan tingkat kesadaran akan “hakekat” dari kehidupan. Bahwa dunia ini adalah plural, dari berbagai segi apakah itu agama, suku, etnis, dan semua itu adalah kodrat yang tidak mungkin dapat diingkari. Karena itu prinsip, bahwa “berbeda adalah rahmat” sangat tepat dalam kehidupan ini. Sebagai pengejawantahan dari pernyataan tersebut hendaknya diikuti dengan cara berpikir dan berperilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti melihat baik atau tidaknya seseorang bukan dari agama yang dianutnya, tetapi dari perilaku mereka, masuk tidaknya seseorang ke sorga bukan dari agama yang dianutnya, tetapi dari amal dan perbuatan mereka di dunia. Semua agama di dunia ini mengajarkan hal-hal yang positif sebagai pedoman moral baik untuk kepentingan horizontal maupun vertikal.

Akhirnya dalam spirit kesatuan inilah, kita menghargai keberbedaan. Perbedaan agama-agama ini harus dikenal dan diolah lebih lanjut, karena perbedaan ini secara potensial

bernilai dan penting bagi setiap orang beragama dalam memperkaya imannya. Dan tidak ada salahnya kalau ada pedoman yang universal, bahwa “Tuhan hanya satu tetapi orang bijak menyebut banyak nama”, tentu dengan tidak mengurangi ketaatan terhadap agama yang dianutnya, dan tidak mengatakan agama orang lain lebih jelek dari agamanya. Setiap pemeluk agama hendaknya selalu berusaha mencari ayat-ayat yang bersumber dari kitab sucinya dengan menonjokan kesamaan-kesamaan yang ada, bukan hanya berbicara tentang sorga dan neraka, apalagi yang ditonjolkan perbedaannya saja. Jadi, mencapai surga bergantung pada bagaimana sikap dan perilaku kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain (Ali, 2008). Faktor eksternal, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang dikeluarkan. Sejak Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat, yaitu mempersiapkan sebagai negara yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sudah sangat disadari oleh para pendiri bangsa ini bahwa Indonesia sebagai negara yang bersifat keberagaman dalam keberagamaan. Karena itu segala kebijakannya selalu mempertimbangkan keberagaman tersebut sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan yang ada. Seperti ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Penetapan ”Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam Pancasila adalah keputusan yang tepat dan berorientasi masa depan bangsa. Semua ini semata-mata untuk tetap menjaga keutuhan bangsa, karena keberagaman sangat sensitif untuk memicu konflik. Seperti dalam perumusan dasar negara kita yang dikenal dengan nama Pancasila, nilai-nilai yang tercantum dari sila pertama sampai kelima bersifat universal artinya dapat diterima oleh semua kalangan.

Begitu juga dengan rumusan UUD 1945 khususnya pasal 29 yang mengakomodir kepentingan warganya untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Andai katapun ada ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut adalah masalah personal dan minoritas. Ini artinya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai, serta tidak mengganggu ketentraman umat dan ketertiban umum. Munculnya peristiwa-peristiwa sparatisme pasca kemerdekaan, awalnya bukanlah karena agama, tetapi lebih karena faktor ekonomi dan politik, kemudian barulah munculnya faktor agama yang ikut berkontribusi terhadap peristiwa sparatis tersebut.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup, yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Perbedaan suku, ras, agama merupakan keniscayaan terhadap cinta-Nya, mengingkari pebedadaan tersebut, sama dengan mengingkari kodrat. Berdasarkan latar belakang sejarah, sejak kehadiran agama-agama di Indonesia, bumi Indonesia bukanlah kosong dari sistem kepercayaan, hanya saja bentuknya masih sangat sederhana. Kehadiran agama-agama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. “*Surga Bukan Monopoli Muslim*”, Tempo. 2008.
- Anderson, B, *Hidup di Luar Tempurung*. Serpong: CV Marjin Kiri. Anonim. 2005.
- Arisandi, H. 2015. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh Tokoh Sosiologi Dari Klasik sampai Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Echikwome, B, *Security Challenges in Africa: The Role of International Community in Conflict Resolution in Nigeria*, International Journal of African and Asia, 2013.
- Gandhi, M, *Semua Manusia Bersaudara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016.
- Giddens, A., *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Jellen, T, *The Constitutional Basis of Religious Pluralism in the United States: Causes and Consequences*. ANNALS, AAPSS, 2007.
- Lombard, D, *Nusa Jawa: Silang Budaya 2*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Lubis, A. Y. *Postmodernisme, Teori dan Metode*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Martono, N. 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Nurcholis, A., & M. Dja'far, A. 2014. *Agama Cinta*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Pruit, D., & Rubin, J, *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Rahman, A., & Kambali, *Religious Tolerance in Malaysia: Problems and Challenges*. Internasional Journal of Ismaic Challeneges, 2013.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Djilid Pertama*. Djakarta: Panitia di Bawah Bendera Revolusi, 1965.